FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHANDALAN NILAI INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Yanto

Akademi Komunitas Dharma Bhakti Bangka

ABSTRACT

This study aims to determine whether the quality of human resources, the use of information technology, the internal control system, the field of financial control, and organizational commitment affect the reliability of the financial reporting information value of the Bangka Regency government. The sample amounted to 96 respondents in the government of Bangka Regency. The sample in this study used purposive sampling using the specified criteria. The type of data and data collection methods are primary data, research data obtained directly from the original source in the form of answers to the questionnaire. The results form factors, namely the internal control system and the financial control area. Where the form factor consists of variable quality of human resources, utilization of information technology, internal control systems, areas of financial control and organizational commitment have a significant influence on the reliability of the value of financial reporting information of local governments. The dominant variable is the internal control system, while the lowest variable is the quality of human resources.

Keywords: *Value of Information, Financial Reporting, Quality Human Resources, Information Technology, Internal Control Systems*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi yang andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang memiliki kualitas andal jika informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan pemerintah, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hasil temuan BPK secara umum masalah yang mendasar adalah masalah administrasi. Kesalahan administrasi tersebut akibat kurangnya kemampuan sumber daya manusia di Pemkab Bangka untuk bidang administrasi keuangan sehingga banyak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Dengan adanya temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yaitu keandalan. Karena keandalan merupakan salah satu unsur nilai informasi penting terkait dengan pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. SAP

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat keandalan. Dimana tingkat keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sistem akuntansi merupakan proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan.

Jadi untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan bagi pemakai laporan, maka laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia yang paham dan mampu menerapkan sistem akuntansi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan maka akan berdampak buruk pada kualitas informasi yang dihasilkan. Selain kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama agar setiap data keuangan yang diolah dapat menghasilkan informasi keuangan yang cepat, andal, informatif dan efisien yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan keuangan daerah dilaksanakan untuk menjamin agar kegiatan pemerintah tidak menyimpang dari tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan daerah berfungsi untuk menghindari perilaku pejabat yang mengelola keuangan daerah dari ketidakjujuran, penyelewengan, kebocoran anggaran dan korupsi. Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana setiap karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dengan adanya komitmen yang kuat pada setiap pegawai dalam mengelola keuangan, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menyajikan informasi yang andal dalam bentuk laporan keuangan.

Penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, antara lain dalam penelitian Arfianti (2011) memberikan temuan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Penelitian Winidyaningrum (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia pada bagian akuntansi/tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten dan hasil temuan BPK memotivasi peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor apa saja mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) peneliti menambah satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu komitmen organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001). Jadi untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, maka laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia yang paham dan mampu menerapkan sistem akuntansi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan maka akan berdampak buruk pada kualitas informasi yang dihasilkan. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Martin (2005) dalam Gunawan (2008) mendefinisikan teknologi informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah, menyimpan dan menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu tepat waktu, relevan, akurat, lengkap dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Di sini teknologi komunikasi digunakan sebagai alat penyaluran informasinya, sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama dalam pengelolaan keuangan daerah maka informasi keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas laporan keuangan diantaranya keandalan. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara baik dan menyeluruh dalam pemerintahan dengan tujuan

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan berfungsi untuk menghindari perilaku pejabat yang mengelola keuangan negara dari ketidak jujuran, penyelewengan, kebocoran anggaran dan korupsi (Rachmat, 2010). Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₄ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Arfan, 2010). Dengan adanya komitmen yang kuat pada setiap pegawai dalam mengelola keuangan, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menyajikan informasi yang andal dalam bentuk laporan keuangan. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₅ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variable dalam penelitian inia adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan agar setiap data yang diolah dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat, informatif dan efisien. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan – tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada responden penelitian diukur dengan menggunakan model skala Likert lima poin dengan skor jawaban sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS), mempunyai skor 1, Tidak Setuju (TS), mempunyai skor 2, Netral (N), mempunyai skor 3, Setuju (S), mempunyai skor 4, dan Sangat Setuju (SS), mempunyai skor 5.

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Bangka, dengan jumlah sample berjumlah 96 responden. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Hipotesis

Analisis Faktor

Pada penelitian ini metode analisis faktor yang digunakan adalah *confirmatory uses* yang mana merupakan penegasan dari hipotesis. Acuan untuk melakukan pengujian dengan test ini adalah korelasi yang cukup kuat antar independen variabel, yaitu > dari 0,5. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 KMO and Barlett's Test

	Keiser-Meiyer-Olkin	Measure of	.850
	Sampling Adequacy		
Barlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square		285.943
	Df		10
	Sig		.000

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, terlihat jelas angka K-M-O > 0,5 yaitu 0,850 dengan angka MSA > 0,5, sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya yaitu faktoring.

Tabel 2 Measure of Sampling Adequacy (MSA)

		KSDM	PTI	SPI	PKD	KO
Anti-image	KSDM	.571	-.119	-.087	.006	-.050
Covariance	PTI	-.119	.392	-.094	-.091	.051
	SPI	-.087	-.094	.251	-.118	-.058
	PKD	.006	-.091	-.118	.245	-.138
	KO	-.050	.051	-.058	-.138	.471
Anti-image	KSDM	.909 ^a	-.250	-.230	.016	-.096
Correlation	PTI	-.250	.868 ^a	-.298	-.293	.119
	SPI	-.230	-.298	.837 ^a	-.476	-.170
	PKD	.016	-.293	-.476	.807 ^a	-.407
	KO	-.096	.119	-.170	-.407	.865 ^a

Sumber: Output SPSS

Setelah dilakukan proses faktoring, *Communalities* pada dasarnya menunjukkan jumlah varians (bisa dalam bentuk persentase) dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada.

Tabel 3 Communalities

	Initial	Extraction
Kualitas Sumber Daya Manusia	1,000	.568
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,000	.710
Sistem Pengendalian Intern	1,000	.841
Pengawasan Keuangan Daerah	1,000	.828
Komitmen Organisasi	1,000	.617

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel *total variance explained* diperoleh informasi bahwa jumlah faktor yang terbentuk ada 1 faktor dengan *eigenvalues* 3,564. Hal ini berarti 71,285% dari seluruh variabel yang ada dapat dijelaskan oleh 1 faktor yang terbentuk.

Tabel 4 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,564	71,285	71,285	3,564	71,285	71,285
2	,588	11,769	83,055			
3	,443	8,852	91,907			
4	,240	4,804	96,711			
5	,164	3,289	100,000			

. Sumber: Output SPSS

Tabel *component matrix* digunakan untuk mendistribusikan variabel-variabel yang telah diekstrak ke dalam faktor yang telah dibentuk berdasarkan *factor loading*(angka-angka yang ada pada tabel tersebut), yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk. Semakin besar nilai *factor loading*, maka menunjukkan variabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam salah satu faktornya dan sebaliknya.

Tabel 5 Component Matrik^a

	Component 1
Kualitas Sumber Daya Manusia	.754
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.842
Sistem Pengendalian Intern	.917
Pengawasan Keuangan Daerah	.910
Komitmen Organisasi	.786

Sumber: Output SPSS

Jadi kelima variabel telah direduksi menjadi 1 faktor yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan keandalan nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dipengaruhi oleh satu faktor yaitu faktor sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah. Faktor sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terdiri dari faktor kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan

komitmen organisasi. Sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah memiliki peran penting dalam rangka mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dapat menyajikan informasi keuangan yang andal dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Sistem pengendalian intern merupakan prosedur – prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data – data bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Jadi untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, maka laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia yang paham dan mampu menerapkan sistem akuntansi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan maka akan berdampak buruk pada kualitas informasi yang dihasilkan. Hal ini berarti kualitas sumber daya manusia mempunyai hubungan positif dengan keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel *anti image matrices*, nilai MSA kualitas sumber daya manusia sebesar 0.909. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia lebih besar dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Teknologi informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah, menyimpan dan menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu tepat waktu, relevan, akurat, lengkap dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Di sini teknologi komunikasi digunakan sebagai alat penyaluran informasinya, sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama dalam pengelolaan keuangan daerah maka informasi keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas laporan keuangan diantaranya keandalan. Berdasarkan tabel *anti image matrices*, nilai MSA pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.868. Nilai ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara baik dan menyeluruh dalam pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan. Berdasarkan tabel *anti image matrices*, nilai MSA sistem pengendalian intern sebesar 0.837. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern lebih besar dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan berfungsi untuk menghindari perilaku pejabat yang mengelola

keuangan negara dari ketidak jujur, penyelewengan, kebocoran anggaran. Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan. Berdasarkan tabel *anti image matrices*, nilai MSA pengawasan keuangan daerah sebesar 0.807. Nilai ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah lebih besar dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Dengan adanya komitmen yang kuat pada setiap pegawai dalam mengelola keuangan, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menyajikan informasi yang andal dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan tabel *anti image matrices*, nilai MSA komitmen organisasi sebesar 0.865. Nilai ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi lebih besar dari 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis faktor terbentuk satu faktor, yaitu faktor sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah yang terdiri dari variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi. Variabel yang dominan adalah sistem pengendalian intern, sedangkan variabel yang paling rendah adalah kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing variabel yaitu variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan antara lain kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden, penulis hanya menggunakan lima variabel dan yang terbentuk hanya satu faktor dan penelitian ini hanya terbatas di beberapa SKPD Kabupaten Bangka saja, sehingga hendaknya diperbanyak objek penelitiannya khususnya jumlah SKPD nya. Oleh karena itu saran yang dapat penulis kemukaan adalah sebagai berikut: Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metoda survei dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuisisioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/ Pernyataan yang sama, Memperbaiki terlebih dahulu kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuisisioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi, dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap keandalan nilai informasi pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks.

- [3] Gani, A. (2015). Analisis Perbandingan Risiko dan Tingkat Pengembalian Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional. *Journal of Accountancy FE UBB*, 1(1).
- [4] Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta.
- [5] Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
- [6] Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintahan. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- [7] Statement of Financial Accounting Concepts no 2 Tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.
- [8] Suhardi, S. (2012). Persepsi pemakai laporan keuangan pemerintah daerah terhadap independensi auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2).
- [9] Sumarsono, Sonny. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- [11] Wijayanto, Nugroho. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Erlangga: Jakarta.